

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

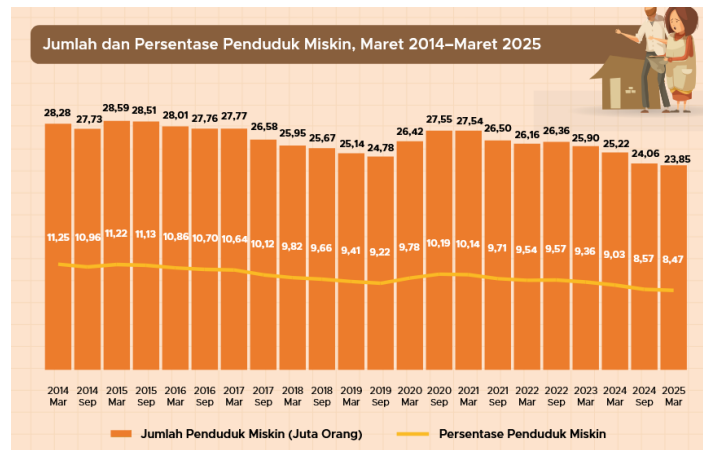
Desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Secara harfiah, istilah ini dapat diartikan sebagai pelepasan dari pusat (Koesoemahatmadja, 1979 dalam Simandjuntak Reynold, 2015). Namun, pengertian tersebut tidak dimaksudkan bahwa suatu daerah dapat berdiri sendiri terlepas dari negara. Dalam konteks ketatanegaraan, desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Victor Situmorang, 1994 dalam Simandjuntak Reynold, 2015). Dengan demikian, daerah memperoleh otonomi untuk berstatus sebagai daerah otonom.

Menurut Wikipedia, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan (Simandjuntak, 2015). Otonomi memberi ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai potensi sumber daya alam, lingkungan, dan budaya tanpa bersifat eksploitasi, tetapi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tim Lapera, 2001 dalam Simandjuntak Reynold, 2015). Dalam hal ini, masyarakat harus menjadi subjek pemberdayaan yang terlibat aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, bukan sekadar penerima manfaat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan kemandirian

dan kesejahteraan melalui pengembangan pemahaman, keterampilan, dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan, program, dan pendampingan sesuai kebutuhan desa agar tercipta pemerintahan yang maju, mandiri, demokratis, serta mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Pembangunan masyarakat merupakan kegiatan yang direncanakan melalui tahapan-tahapan pembangunan dengan tujuan utama mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Gunawan W. & Sutrisno B., 2021). Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, yaitu dengan memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki masyarakat. Pemanfaatan potensi alam dan budaya tersebut dapat memberikan kontribusi positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja baru. Menurut Ahmad Soleh (2017) dalam Endah K. (2020), potensi lokal desa merupakan daya, kekuatan, serta kemampuan yang dimiliki suatu desa dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi yang ada di suatu wilayah belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai kekuatan daerah, sehingga belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan sendiri muncul karena keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar, dan melalui upaya pemberdayaan, tingkat kemiskinan dapat dikurangi.



Gambar 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Menurut BPS, pada Maret 2025 terdapat 23,85 juta penduduk miskin di Indonesia, dengan persentase kemiskinan di pedesaan (11,03 %) lebih tinggi dibanding perkotaan (6,73 %). Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian pemerintah dalam menekan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera (Sutrisno, 1995 dalam Pathony, 2020). Pemberdayaan memungkinkan kebutuhan hidup warga terpenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, kemajuan suatu daerah sangat tergantung pada pengelolaan ekonomi lokal yang baik (S. Munfaati, 2019).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas dengan cara mengorganisir diri untuk merancang perencanaan dan tindakan kolektif guna menyelesaikan permasalahan atau memenuhi kebutuhan sosial berdasarkan kemampuan serta sumber daya yang mereka miliki (Sumodiningrat, 2009). Sementara itu, menurut Alfitri (2011), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mencakup pendekatan berpusat pada

manusia (*people-centered*), melibatkan partisipasi aktif masyarakat (*participatory*), berorientasi pada penguatan kapasitas individu maupun kelompok (*empowering*), serta berprinsip pada keberlanjutan (*sustainable*) (Robert Chambers, 1994, dalam Maslihah et al., 2022). Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas dan kekuatan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan atau kurang berdaya. Ketidakberdayaan ini dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti ketidakadilan dalam struktur sosial yang menekan atau membatasi peluang mereka. (Hamid, 2018)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pasal 1 ayat 15, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat pedesaan dan perkotaan di daerah.

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, salah satunya Danau Rawa Pening. Rawa Pening adalah danau alami seluas 2.670 hektar yang berada di cekungan rendah dan dikelilingi Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran, menawarkan panorama yang indah dan menenangkan (Abimanyu, 2016). Daya tampung air di Rawa Pening sekitar 65 juta meter kubik pada ketinggian 463,90 mdpl, danau ini memiliki ekosistem penting yang memengaruhi lingkungan

sekitarnya. Perubahan di kawasan ini berdampak besar bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam Rawa Pening, khususnya di Kabupaten Semarang (Seftyono, 2014).

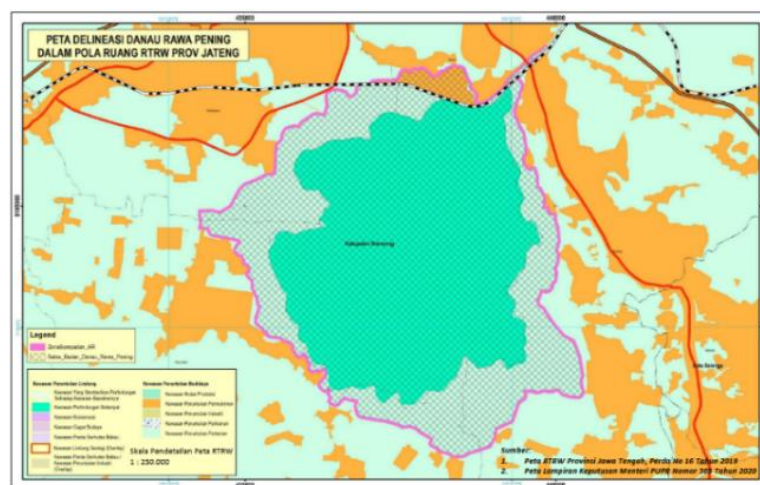
Rawa Pening memiliki beberapa fungsi penting diantaranya: (1) Sebagai wadah alami untuk menampung dan menahan aliran air permukaan, menggerakkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok. (2) Sebagai daya Tarik wisata karena keindahan alamnya yang menawan. Hal tersebut membuat Rawa Pening menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi sebagian masyarakat sekitar dengan menyewakan perahu motor, pertunjukan musik dari kelompok seni lokal, gembok cinta, dan gardu pandang sebagai spot menikmati pemandangan. (Nugraha et al., 2023). (3) Sebagai sektor ekonomi di bidang perikanan. Rawa Pening menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan air tawar seperti nila, karper rumput, gabus, lele, wader bintik, dan betutu (Tul'ulum et al., 2023). Banyaknya jenis ikan yang ada di Rawa Pening mendorong masyarakat sekitar mengembangkan usaha budidaya perikanan, selain itu ikan juga dapat dijual di pasar ataupun bisa menjadi pemasok rumah makan yang menyajikan masakan ikan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Rawa Pening saat ini menghadapi permasalahan lingkungan, yaitu pendangkalan yang terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang berkontribusi besar adalah pertumbuhan permukiman di sekitar danau yang semakin padat. Peningkatan aktivitas manusia di sekitar Rawa Pening telah mempercepat proses pendangkalan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Kesongo 2020-2025

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	3.856	3.870	3.986	4.032	4.078	4.088
Perempuan	3.850	3.892	3.979	4.033	4.087	4.120
Jumlah	7.706	7.762	7.965	8.065	8.165	8.208

Sumber: Data Desa Kesongo, 2025

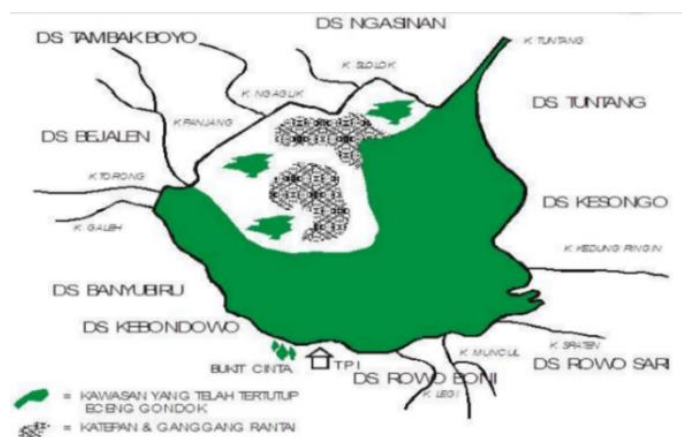
Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol mempercepat erosi di bagian hulu dan menyebabkan banyaknya sampah rumah tangga serta limbah wisata yang mengapung di Danau Rawa Pening (Kintani, Khikmah, & Kamal, 2024). Pada musim hujan, aliran permukaan membawa sampah dan material dari permukiman maupun lahan terbuka ke danau, yang kemudian mengendap dan memicu pendangkalan (Aulia Rahma et al., 2024). Akibatnya, kapasitas tampung air danau semakin berkurang (Kintani, Khikmah, & Kamal, 2024). Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, kawasan berwarna oranye menunjukkan wilayah permukiman.



Gambar 1.2 Peta Delineasi Danau Rawa Pening Dalam Pola Peta Ruang RTRW Prov. Jateng

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2021

Rawa Pening juga menghadapi persoalan utama berupa pertumbuhan eceng gondok atau bengkok yang tidak terkendali. Tanaman berdaun tebal dan mengapung ini dapat berkembang pesat hingga mencapai bobot basah 125 ton per hektare dalam enam bulan, sehingga mempercepat pendangkalan danau (Heyne dalam Sahwalita, 2008; Sugilar et al., 2023). Laporan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (2021) mencatat kedalaman Rawa Pening kini hanya sekitar 3 meter dari semula 15 meter pada 1994, terutama akibat limpasan pupuk kimia dari lahan pertanian hulu (Marsodo, 2016). Eceng gondok juga menimbulkan berbagai dampak lain, seperti menghambat transportasi nelayan, merusak lahan pertanian karena menjadi sarang tikus, menyumbat saluran irigasi, serta menurunkan kualitas air dan estetika kawasan wisata (Ningsih, 2019). Tidak heran jika keberadaan tanaman ini memunculkan rasa jengkel bagi masyarakat, sesuai dengan makna kata “gondok” dalam bahasa sehari-hari (Utomo, 2017).



Gambar 1.3 Daerah Tertutup Tanaman Eceng Gondok
Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab,Semarang, 2020

Permasalahan tersebut diperkuat oleh penelitian Harun et al. (2021) yang menjelaskan bahwa invasi tanaman air seperti eceng gondok memberikan

dampak signifikan bagi masyarakat pedesaan yang bergantung pada badan air sebagai sumber mata pencaharian. Keberadaan eceng gondok yang tidak terkendali membawa dampak serius bagi masyarakat di berbagai sisi. Kualitas air yang menurun membuat populasi ikan berkurang, sehingga hasil tangkapan nelayan pun ikut merosot. Gulma yang tumbuh lebat juga menyulitkan warga dalam mengakses perairan, merusak alat tangkap, bahkan memicu perselisihan antarwarga soal pemanfaatan sumber air. Dari sisi kesehatan, eceng gondok menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan siput yang berpotensi menyebarkan penyakit kepada masyarakat sekitar. Tidak berhenti di sana, pertumbuhan tanaman ini bahkan dapat merusak fasilitas umum seperti generator pembangkit listrik di bendungan, yang tentunya berdampak pada pelayanan publik secara lebih luas. Situasi ini jelas membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

Kondisi ini justru mendorong perlunya pemahaman yang lebih kuat mengenai hak dan potensi pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Eceng gondok tidak hanya dipandang sebagai ancaman bagi ekosistem, tetapi juga memiliki potensi yang dapat dikelola dengan tepat sehingga memberikan nilai ekonomi tanpa merusak lingkungan. Pemahaman terhadap hak untuk mengelola potensi lokal secara bertanggung jawab menjadi penting agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem danau (Akter et al., 2023).

Pemerintah Pusat telah menetapkan Danau Rawa Pening sebagai salah satu danau prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021

tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Kintani, Khikmah, & Kamal, 2024). Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, berbagai upaya pengendalian eceng gondok dilakukan dengan metode fisik dan mekanis oleh Unit Operasi Pengendalian Rawa Pening IV (OP IV), menggunakan peralatan seperti *Harvester Berky*, *Amphibian Weed Harvester*, *Excavator*, dan *Dump Truck*. Namun, cara ini tidak sepenuhnya efektif karena eceng gondok tumbuh sangat cepat hanya 22 hari untuk menutupi 1 meter persegi perairan. Selain itu, pembersihan fisik tidak menyelesaikan akar masalahnya, yaitu tingginya kandungan fosfor dari limbah manusia yang terus "menyuburkan" pertumbuhannya. Metode kimiawi dengan herbisida seperti *Imazapyr*, *Glyphosate*, *Triclopyr*, dan *Diquad* dinilai efisien di lokasi tertentu, tetapi tidak dapat diterapkan di Rawa Pening karena berpotensi mencemari sumber air minum, pertanian, dan kawasan wisata. Upaya biologis melalui pelepasan ikan koan juga tidak memberikan hasil optimal karena ikan tersebut ditangkap oleh nelayan sehingga tidak dapat mengendalikan pertumbuhan eceng gondok (Prasetyo S, 2024). Secara keseluruhan, berbagai metode yang ada masih bersifat sementara dan belum mampu mengatasi lonjakan pertumbuhan eceng gondok yang sulit dikendalikan (Ningsih, 2019).



Gambar 1.4 Penumpukan Sampah Eceng Gondok
Sumber: Data Primer, 2025

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qureshi dan Dhotkar (2024) menunjukkan bahwa eceng gondok ditemukan melimpah di Distrik Chandrapur, India. Namun upaya penanganan eceng gondok di Distrik Chandrapur masih belum efektif meskipun pemerintah kota telah melakukan ekstraksi manual secara rutin. Gulma yang telah dipanen umumnya dibuang ke tempat pembuangan akhir atau dibakar, namun kedua metode ini menimbulkan persoalan baru karena meningkatkan volume sampah, menghasilkan gas berbahaya seperti metana, hidrogen sulfida, dan karbon dioksida, serta menurunkan kualitas udara. Selain tidak ramah lingkungan, proses pembersihan manual juga membutuhkan biaya besar, kendaraan pengangkut, serta tenaga terampil yang bekerja dalam kondisi berisiko, sementara pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat kembali menutupi badan air hanya dalam dua minggu. Temuan ini menegaskan bahwa metode penanganan yang digunakan belum mampu memberikan solusi jangka panjang terhadap invasi eceng gondok.

Meskipun berbagai upaya pengendalian belum memberikan hasil optimal, dengan kapasitas organisasi yang kuat dan memadai, tanaman ini dapat diubah menjadi sumber daya produktif yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Penguatan kapasitas tersebut penting agar pengendalian eceng gondok tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume tanaman, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan yang berkelanjutan sehingga menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga sekitar (Rakotoarisoa et al., 2016).

Disisi lain, keterbatasan keterampilan masyarakat Desa Kesongo dalam mengolah eceng gondok menjadi faktor utama mengapa tanaman ini belum dimanfaatkan sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi. Masyarakat masih berada pada tahap pemanfaatan dasar, yaitu memanen eceng gondok dari rawa pening dan menjualnya dalam bentuk mentah, baik basah maupun kering setelah dijemur selama satu hingga dua minggu (Hartanto, 2021). Harga jual eceng gondok mentah tergolong sangat rendah, yaitu Rp 20.000/gelondong untuk kondisi basah dan Rp 15.000/bal untuk yang kering, angka yang tidak sebanding dengan waktu, tenaga, serta risiko keselamatan yang dihadapi masyarakat saat mengambil eceng gondok di rawa (Setyaji dalam Sustainable Profile, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan eceng gondok oleh masyarakat masih berada pada tahap ekonomi tradisional, di mana warga hanya berperan sebagai pelaku pasif dalam rantai produksi tanpa adanya peningkatan nilai tambah. Akibatnya, perekonomian masyarakat Desa Kesongo menjadi stagnan karena potensi eceng gondok belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.



Gambar 1.5 Pengeringan Eceng Gondok
Sumber: Data Sekunder, 2021

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian Hannaji, Bagiastra, dan Kurniansah (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan masyarakat dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pemberdayaan di tingkat lokal. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Desa Wisata Bayan belum mampu mengembangkan potensi pariwisata secara optimal karena minimnya pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang relevan dengan sektor pariwisata. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga mereka kesulitan memahami peluang ekonomi yang sebenarnya tersedia di lingkungan mereka sendiri. Kekurangan kemampuan teknis dan nonteknis ini membuat masyarakat cenderung pasif dan belum dapat mengambil peran strategis dalam pengembangan potensi lokal.

Pemanfaatan potensi lokal tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan mentah, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengolahnya menjadi produk yang lebih kompetitif melalui kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknik produksi. Dengan dukungan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, potensi tersebut dapat dikelola secara mandiri untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan mendorong kegiatan yang lebih produktif (Hartanto, 2021).

Masalah lain, di Desa Kesongo pemanfaatan eceng gondok belum berkembang secara optimal karena sebagian besar warga masih ragu memulai usaha akibat keterbatasan modal, akses pasar, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Banyak warga tidak memiliki modal awal untuk membeli peralatan

dan bahan produksi, sehingga kapasitas usaha sulit berkembang dan inovasi produk terbatas. Pengetahuan masyarakat tentang strategi pemasaran, pemanfaatan media digital, dan kerja sama dengan berbagai pihak juga masih rendah, membuat produk eceng gondok hanya dipasarkan secara lokal dengan harga dan permintaan yang tidak stabil. Selain itu, kegiatan masyarakat berlangsung secara mandiri tanpa pendampingan berkelanjutan, sementara pemerintah desa bersikap reaktif dan hanya merespons ketika muncul keluhan dari masyarakat (Waworuntu et al., 2021).

Keterbatasan modal, akses pasar, dan dukungan kelembagaan yang memadai pada akhirnya berdampak langsung pada tidak optimalnya proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Patony (2019) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan sering terhambat oleh lemahnya koordinasi antarperangkat desa, ketidakaktifan pengurus di tingkat kecamatan dan desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengemasan dan pemasaran produk lokal. Penelitian Anggara dan Rezki (2023) juga memperkuat temuan tersebut, di mana pengembangan potensi lokal di Wisata Lembah Desa Pulutan mengalami kendala serius akibat terbatasnya pendanaan, sehingga berbagai program pemberdayaan tidak dapat berjalan secara maksimal meskipun jumlah pengunjung cukup tinggi.

Pemanfaatan potensi lokal perlu adanya akses yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Maka, masyarakat perlu memiliki kemampuan manajemen keuangan agar dapat merencanakan dan mengatur biaya dengan baik, serta mendapat akses pada sumber pembiayaan yang sesuai.

Pengembangan jaringan pemasaran juga penting, termasuk membangun brand dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2024 dalam Ahmadfaidlulll, 2024). Selain itu, dukungan pemerintah melalui bantuan modal, kemudahan perizinan, dan penyediaan infrastruktur menjadi faktor penting agar pengembangan potensi lokal dapat berjalan lebih optimal.

Inisiatif pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo bermula dari gagasan seorang warga yang melihat peluang pengembangan ekonomi lokal melalui pengolahan tanaman tersebut menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi Bengok Craft, sebuah usaha kecil berbasis potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat setempat (Wiranto, 2024) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Setelah mengalami penurunan aktivitas akibat pandemi Covid-19, Bengok Craft mulai kembali merintis dan menjalankan kegiatan usahanya secara bertahap pada tahun 2022, di mana pada periode tersebut jumlah pengrajin terdaftar dan pengrajin aktif masih relatif sama. Namun, dalam perkembangannya, meskipun Bengok Craft menunjukkan peningkatan kinerja usaha yang tercermin dari bertambahnya jumlah pelanggan, pesanan, dan pendapatan serta keberhasilan menjangkau pasar internasional, tingkat keaktifan pengrajin justru menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, sehingga peningkatan aktivitas usaha belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan keterlibatan pengrajin dalam

proses produksi. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, pada bagian selanjutnya disajikan data perkembangan Bengok Craft periode 2022–2024.

Tabel 1.2 Data Perkembangan Usaha Bengok Craft Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pesanan	Jumlah Pengrajin Terdaftar	Jumlah Pengrajin Aktif	Pendapatan
2022	780	155	15	15	150 jt
2023	1.150	230	15	10	235 jt
2024	1.980	395	15	6	285 jt

Sumber: Arsip Bengok Craft, 2025

Temuan penelitian Waworuntu et al. (2021) turut memperkuat gambaran bahwa rendahnya tingkat keterlibatan aktif masyarakat masih menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemberdayaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggota Kelompok Tani Immanuel di Desa Raringis belum sepenuhnya memanfaatkan program pemberdayaan yang telah diberikan. Kurangnya keterlibatan aktif dari sebagian anggota menyebabkan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian petani belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program atau bantuan yang diberikan, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat keterlibatan dan komitmen anggota dalam mengikuti dan menjalankan program tersebut secara berkelanjutan.

Keterlibatan aktif masyarakat memegang peran penting dalam keberhasilan proses pemberdayaan. Keterlibatan aktif warga dalam pengembangan ekonomi berbasis lokal, termasuk dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tidak hanya mendorong peningkatan kemandirian ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat rasa

percaya diri serta membangun hubungan sosial yang lebih solid di antara anggota masyarakat. Melalui keterlibatan aktif tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan usaha berbasis potensi lokal (Aprilia et al., 2023 dalam Chusnulitta Jatnika, Humaedi, & Puti Firsanty, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, berbagai permasalahan di kawasan Rawa Pening dan Desa Kesongo, seperti pertumbuhan eceng gondok yang berdampak ekologis dan sosial, keterbatasan keterampilan masyarakat, serta kendala modal, akses pasar, dan dukungan kelembagaan, menunjukkan kompleksitas tantangan dalam pemberdayaan masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, Bengok Craft hadir sebagai wadah pengolahan eceng gondok yang memiliki potensi ekonomi. Namun, perkembangan Bengok Craft yang ditandai dengan peningkatan jumlah pesanan belum diikuti oleh peningkatan keterlibatan pengrajin aktif dalam proses produksi. Ketidakseimbangan ini menunjukkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan berdampak pada belum optimalnya proses pemberdayaan masyarakat, karena peluang keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif masih terbatas. Situasi inilah yang melahirkan pertanyaan penelitian: “Mengapa keberadaan Bengok Craft belum mampu memberdayakan masyarakat Desa Kesongo yang belum bekerja?” Maka, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Eceng Gondok di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.”**

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya pendangkalan Danau Rawa Pening akibat aktivitas manusia di sekitar danau serta pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali. Kondisi ini menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan aktivitas ekonomi masyarakat, dan penurunan daya tarik wisata di kawasan sekitar..
2. Upaya pengendalian eceng gondok di Rawa Pening belum efektif karena upaya tersebut dirasa hanya memberikan solusi sementara terhadap masalah peningkatan jumlah tanaman eceng gondok, sehingga pertumbuhannya tetap lebih cepat dari penanganannya.
3. Masyarakat belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengolah eceng gondok menjadi produk bernilai tambah sehingga sebagian besar masih menjual eceng gondok dalam bentuk mentah dengan harga rendah yang tidak sebanding dengan risiko dan upaya besar saat pengambilan dari rawa.
4. Keterbatasan akses modal, pasar, dan dukungan kelembagaan menghambat upaya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan eceng gondok.

5. Bengok Craft telah hadir sebagai upaya pemanfaatan eceng gondok menjadi produk kerajinan, namun menghadapi kesenjangan antara peningkatan permintaan pasar dan penurunan jumlah pengrajin aktif.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal, khususnya

dalam pengolahan eceng gondok melalui Bengok Craft di Desa Kesongo.

2. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang belum berjalan optimal, sehingga dapat memperkaya kajian administrasi publik, terutama dalam memahami bagaimana program atau inisiatif pemberdayaan dijalankan dan tantangan yang dihadapi di tingkat lokal.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan dan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau program yang mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan terhadap usaha kecil berbasis komunitas.
2. Bagi Dunia Usaha dan UMKM: Menjadi contoh praktik baik dalam mengelola potensi lokal dengan pendekatan inovatif yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Memberikan inspirasi bagi UMKM lain untuk mengadopsi inovasi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha serta mengelola usaha yang melibatkan masyarakat.

3. Bagi Bengok Craft: Memberikan masukan mengenai kondisi pemberdayaan yang sedang berjalan, terutama terkait keterlibatan pengrajin, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan usaha ke depan.
4. Bagi Masyarakat Desa Kesongo: Memberikan pemahaman tentang peluang dan tantangan dalam pemanfaatan eceng gondok sebagai sumber penghasilan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Randi (2018:15), penelitian-penelitian terdahulu berperan sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga dapat memperluas dan memperdalam landasan teori yang digunakan. Dari tinjauan literatur yang dilakukan, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti penelitian ini. Namun demikian, beberapa penelitian sebelumnya tetap diangkat sebagai referensi untuk memperkaya kajian dan mendukung analisis dalam penelitian ini. Berikut disajikan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tabel 1.3 *State of Art*

No.	Peneliti/Tahun/Jurnal/Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Temuan Penelitian
1.	(Muzahid Akbar Hayat, Sanusi, dan Khuzaini, 2020) <i>Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat</i> Pemberdayaan Masyarakat melalui Penerapan Pengembangan Desa Lok Baintan Lewat Inovasi Eceng Gondok Menjadi Kertas Kreasi	Memberdayakan masyarakat Desa Lok Baintan melalui pemanfaatan eceng gondok menjadi produk kertas kreasi yang bernilai ekonomi serta ramah lingkungan.	Menurut Kartasasmita (1995), yang menekankan pentingnya menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat kemampuan mereka, serta meningkatkan kemandirian dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.	Metode menggunakan kualitatif deskriptif melalui diskusi kelompok terarah (FGD), pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pendampingan dalam proses produksi, manajemen, dan pemasaran.	Hasil menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lok Baintan mampu berinovasi mengolah eceng gondok menjadi kertas kreasi seperti hiasan, tempat tisu, dan buku catatan. Program ini juga meningkatkan keterampilan, partisipasi, dan pendapatan masyarakat, meskipun masih perlu peningkatan dalam manajemen dan pemasaran produk.
2.	(Tony Patony, 2019) <i>International Journal of Demos</i> Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang	Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan Gerakan Kesejahteraan Keluarga Di Subang.	Menurut Sutrisno (1995), pemberdayaan masyarakat didasari pemikiran bahwa pembangunan akan lebih efektif bila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraannya sendiri. Menurut Suharto (1997:218–219) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai	Metode menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai permasalahan kehidupan kerja melalui observasi, wawancara, studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan di Kabupaten Subang belum berjalan optimal. Berdasarkan teori pemberdayaan Edi Suharto, lima tahapan prosesnya : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan belum sepenuhnya terwujud di lapangan.

			pendekatan memiliki lima yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Pelindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan	kepastakaan, dan dokumentasi.	
3.	Andi Ismail Lukman (2021) <i>Jurnal Pendidikan Luar Sekolah</i> Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda	Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal di PKBM Tiara Dezzy serta menilai sejauh mana tahapan pemberdayaan telah terlaksana.	Tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto (2005) dan Mardikanto (2013), yang meliputi tahap penyadaran, transformasi kemampuan, dan kemandirian sebagai proses bertahap menuju masyarakat yang mandiri.	Metode menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	Proses pemberdayaan di PKBM Tiara Dezzy belum berjalan utuh. Tahap penyadaran tidak terlaksana, tahap transformasi pengetahuan berjalan baik namun belum sepenuhnya berbasis potensi lokal, dan tahap kemandirian belum tercapai. PKBM hanya sampai pada peningkatan kapasitas tanpa menghasilkan masyarakat yang benar-benar mandiri.
4.	(Alief Indra Pratama, Herwan Fitriawan, Maya Lutviana Aulia, Dimas Aji Prastyo, dan Ridwan Ridwan, 2023) <i>Jurnal Pekerjaan Sosial</i> Pemberdayaan Masyarakat dalam Betel Leaf Empowerment Hub Program	Mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui <i>Betel Leaf Empowerment Hub Program</i> PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan	Menurut Edi Suharto (1997), yang mencakup lima dimensi proses: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, sebagai upaya menciptakan kemandirian serta keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.	Metode menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Betel Leaf Empowerment Hub Program</i> berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan keterampilan, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, penerapan lima dimensi pemberdayaan menurut Edi Suharto belum optimal, terutama dalam aspek pemeliharaan dan penyokongan, karena masih dibutuhkan

	PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI	masyarakat di Kelurahan Mekarsari.			pendampingan lanjutan agar masyarakat benar-benar mandiri dan program dapat berkelanjutan.
5.	(Mustafirin, Agus Riyadi, & Jihan Irwana Saputri, 2021) <i>Jurnal Al-Ijtimaiyyah</i> Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Berkah Jaya Plastindo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dan dampak yang dihasilkan dari kegiatan Bank Sampah Induk Berkah Jaya Plastindo di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.	Menurut Edi Suharto (2005) pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar berdaya dan mandiri. Tahapan pemberdayaan menurut Kartasasmitha (1996), yang menekankan pentingnya proses bertahap dari penyadaran hingga kemandirian masyarakat.	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Proses pemberdayaan melalui bank sampah berlangsung dalam tiga tahap, yaitu penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi kemampuan, serta peningkatan kemampuan intelektual masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan, keterampilan, dan pendapatan masyarakat
6.	(Niki Hannaji, I Ketut Bagiastra, & Rizal Kurniansah, 2022) <i>Journal of Responsible Tourism</i> Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata di Desa Wisata Bayan	Mengetahui peran masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Desa Wisata Bayan serta menelaah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam pengelolaan desa wisata tersebut.	Menurut Ron Johnson dan David Redmond (1992) dalam <i>The Art of Empowerment</i> , pemberdayaan merupakan seni yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, yang memberi ruang bagi keragaman potensi manusia untuk berkembang secara alami dan saling melengkapi	Metode menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bayan memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar, namun pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pengembangannya masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan agar lebih mandiri dan berkelanjutan..

			sebagai proses alamiah dalam mencapai kesejahteraan bersama.		
7.	(Kiki Setyaningsih & Sri Yuliani, 2022) <i>Jurnal Mahasiswa Wacana Publik</i> Community Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM))	Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dilihat dari perspektif <i>community governance</i> .	Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), yang meliputi tiga tahapan proses: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan sebagai upaya menuju kemandirian masyarakat.	Metode menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pemberdayaan di Komunitas DBM dilakukan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Namun, partisipasi dan kesadaran anggota masih terbatas, serta pelatihan keterampilan dan fasilitas pendukung belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kerja sama dan program penguatan kapasitas bagi penyandang disabilitas.
8.	(Frisca N. Waworuntu, Florence D. J. Lengkong, & Very Y. Londa, 2021) <i>Jurnal Administrasi Publik</i> Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kelompok Tani Immanuel di Desa Raringis Kecamatan	Menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Tani Immanuel di Desa Raringis, serta menilai sejauh mana tahapan pemberdayaan masyarakat telah terlaksana.	Menurut Sumodiningrat (2007) tahapan pemberdayaan masyarakat meliputi tahap penyadaran, transformasi kemampuan kerja, dan peningkatan kemampuan intelektual.	Metode menggunakan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kelompok Tani Immanuel telah berjalan cukup baik melalui penyuluhan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan, meskipun masih terkendala partisipasi, sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan pemerintah untuk keberlanjutan program.

	Langowan Barat Kabupaten Minahasa				
9.	(Sri Maslihah, Helli Ihsan, & Ismawati Kosasih, 2022) <i>Jurnal Pengabdian Psikologi</i> Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kampung Hijau di Kampung Anggrek Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat	Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Hijau.	Menurut Robert Chambers (1994) yang memandang pemberdayaan sebagai konsep pembangunan ekonomi berbasis nilai sosial dengan pendekatan <i>people-centered, participatory, empowering, and sustainable</i> .	Metode menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Hijau meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan kemandirian warga dalam mengelola sampah. Masyarakat bertransformasi dari objek menjadi subjek pembangunan, ditunjukkan melalui inisiatif swadaya, partisipasi aktif, dan kemampuan mandiri dalam melanjutkan program tanpa ketergantungan pada fasilitator.
10.	(David Safri Anggara dan Muhammad Rezki, 2023) <i>Journal of Social Development Studies</i> Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Wisata Lembah Desa Pulutan	Mengkaji proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui pengelolaan Wisata Lembah Desa Pulutan oleh BUMDes Maju Mandiri.	Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberdayaan (pendayaan).	Metode menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan di Wisata Lembah Desa Pulutan telah berjalan melalui ketiga tahap tersebut, ditandai dengan peningkatan kesadaran potensi lokal, pelatihan bagi masyarakat, serta keterlibatan langsung warga dalam pengelolaan wisata, meskipun masih terkendala keterbatasan dana dan kesiapan sumber daya manusia.
11.	(Thongtep Sirisoda, 2024)	Mengatasi tantangan ekologis yang	Eceng gondok (<i>Eichhornia crassipes</i>) merupakan gulma	Metode menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan inovasi kain

	Journal <i>ArtsEduca</i> 38 <i>Thailand's Traditional Art of Water Hyacinth Weaving: Reviving a Craft for Modern Sustainability</i>	ditimbulkan oleh eceng gondok invasif di Asia Tenggara dan mengubahnya menjadi strategi anyaman yang berkelanjutan untuk ekonomi kreatif	yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan (Sirisoda, 2024, mengutip Su et al., 2018). Pemanfaatannya sebagai serat alami dinilai sejalan dengan tren global keberlanjutan serta berpotensi meningkatkan pendapatan dan menciptakan peluang kerja dalam ekonomi modern (Sirisoda, 2024, mengutip Suksikarn & Suksikarn, 2021).	kualitatif yang berlandaskan pada pengetahuan adat/lokal (<i>indigenous knowledge</i>) dengan teknik wawancara, observasi, analisis dokumen, survei, dan analisis tematik	berkelanjutan dengan komposisi 40% serat eceng gondok dan 60% kapas, yang tidak hanya melestarikan kearifan tradisional Thailand tetapi juga terbukti meningkatkan pendapatan lokal dan memberdayakan pengrajin wanita melalui pengurangan spesies invasif secara ekologis.
12.	(Irina Harun, Hafizah Pushiri, Ahmad Juhari Amirul-Aiman, dan Zufarzaana Zulkeflee, 2021) Journal <i>Plants</i> <i>Invasive Water Hyacinth: Ecology, Impacts and Prospects for the Rural Economy</i>	Meninjau ekologi dan dampak invasi eceng gondok terhadap masyarakat pedesaan serta mengusulkan model mikroekonomi sirkular berbasis pemanfaatan eceng gondok untuk mendorong perilaku pro-lingkungan.	Eceng gondok merupakan gulma invasif yang merusak lingkungan dan ekonomi, namun partisipasi masyarakat lokal penting untuk pengendaliannya (Jones, 2000). Pendekatan <i>green nudges</i> dinilai efektif mendorong pemanfaatan eceng gondok secara berkelanjutan (Fanghella et al., 2019; Schubert, 2017).	Metode menggunakan kualitatif melalui analisis literatur dan studi kasus pemanfaatan eceng gondok di berbagai wilayah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa eceng gondok memiliki potensi tinggi sebagai bahan berkelanjutan untuk produk fashion dan dekoratif. Pemanfaatan ini tidak hanya membantu mengendalikan pertumbuhan gulma air tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja masyarakat lokal.

13.	(Dr. Anjum Nazir Qureshi & Swati Dhotkar, 2024) <i>Journal of Engineering, Science, Agriculture & Management</i> <i>Turning Water Hyacinth into Beautiful Handicrafts to Maintain Biodiversity</i>	Menunjukkan bagaimana pemanfaatan eceng gondok dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi melalui pelatihan pembuatan kerajinan bagi perempuan pedesaan dan suku di Chandrapur, India.	Eceng gondok adalah gulma air invasif yang menyebabkan penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, dan gangguan terhadap kehidupan akuatik (Villamagna & Murphy, 2010; Basaula et al., 2023). Potensi eceng gondok sebagai bahan biomassa, pupuk, hingga kerajinan tangan yang bernilai ekonomi (Rakotoarisoa et al., 2016; Borah, 2014).	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan best practice yang menggambarkan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan eceng gondok di Chandrapur, India.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan eceng gondok menjadi produk seperti tas, topi, dan tikar berhasil meningkatkan pendapatan dan kemandirian perempuan desa, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati melalui pembersihan gulma air. Proyek ini berkontribusi pada pencapaian SDGs 5 (Kesetaraan Gender) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
14.	(Afsana Akter, Md. Kawsar Alam Nadim, Mariom Mitu, Md. Selim Reza, S.M. Abdul Alim, & Md. Mohimenul Islam, 2023) <i>Journal of Agroforestry and Environment</i> <i>Water Hyacinth: Potential Applications for Environmental Sustainability</i>	Menilai persepsi masyarakat lokal terhadap eceng gondok dan mengidentifikasi potensi pemanfaatannya yang berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Bangladesh.	Eceng gondok (<i>Eichhornia crassipes</i>) merupakan salah satu gulma air paling invasif di dunia yang mengganggu kualitas air dan kehidupan akuatik (Simberloff & Rejmánek, 2011; Gopal, 1987). Namun, tanaman ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk organik, biogas, dan bahan kerajinan yang mendukung ekonomi	Metode survei lapangan dengan kuesioner pada tiga desa di distrik Kishoregonj, Bangladesh, dengan pendekatan cluster sampling. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal menggunakan eceng gondok sebagai bahan bakar, pakan ternak, pupuk, dan mulsa, serta memiliki minat tinggi untuk mengembangkannya menjadi bio-fertilizer, biogas, dan kerajinan tangan. Pemanfaatan ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

	<i>and Socio-economic Development</i>		sirkular dan keberlanjutan lingkungan (Patel, 2012; Villamagna, 2009).		
15.	(T. F. Rakotoarisoa, T. Richter, H. Rakotondramanana and J. Mantilla-Contreras, 2016) <i>Journal of Aquatic Plant Management</i> <i>Turning a Problem Into Profit: Using Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) for Making Handicrafts at Lake Alaotra, Madagascar</i>	Meneliti potensi pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan tangan berkelanjutan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar Danau Tana, Ethiopia.	Eceng gondok merupakan salah satu gulma air paling invasif di dunia yang menyebabkan kerusakan ekosistem perairan (Gopal, 1987). Namun, melalui pendekatan ekonomi hijau, pemanfaatan biomassa eceng gondok dapat mengubah masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi (Villamagna & Murphy, 2010).	Metode menggunakan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengrajin lokal, dan pelatihan pembuatan kerajinan berbahan eceng gondok di wilayah sekitar Danau Tana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan kerajinan terbukti efektif meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, mengurangi dampak lingkungan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Program ini menunjukkan potensi tinggi untuk diterapkan sebagai strategi pengelolaan gulma berkelanjutan di daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Sumber : diolah oleh penulis, 2025

Penelitian mengenai eceng gondok secara umum menunjukkan bahwa tanaman ini menimbulkan berbagai permasalahan ekologis dan sosial ekonomi apabila tidak dikelola secara tepat. Harun dkk. (2021) menjelaskan bahwa eceng gondok merupakan gulma air invasif yang dapat merusak ekosistem perairan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Akter dkk. (2023) serta Rakotoarisoa dkk. (2016), yang menegaskan bahwa pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu pemanfaatan danau sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut mendorong perlunya pendekatan pemanfaatan eceng gondok sebagai solusi pengendalian yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian mengembangkan pemanfaatan eceng gondok dalam ekonomi kreatif sebagai strategi pemberdayaan. Hayat dkk. (2020) menunjukkan bahwa pelatihan pengolahan eceng gondok dapat meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat, meski masih memerlukan penguatan manajemen dan pemasaran. Qureshi & Dhotkar (2024) serta Sirisoda (2024) juga menegaskan potensi eceng gondok sebagai bahan kerajinan yang mendukung ekonomi lokal dan ramah lingkungan. Namun, keberhasilan program-program tersebut tetap bergantung pada kesiapan masyarakat dan tersedianya pelatihan yang memadai.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal. Lukman (2021) menemukan bahwa pendidikan nonformal belum optimal karena tahap penyadaran dan peningkatan kapasitas belum berjalan menyeluruh. Mustafirin dkk. (2021) juga menegaskan bahwa pemberdayaan melalui bank sampah membutuhkan pendampingan intensif agar kemampuan teknis masyarakat dapat berkembang. Dengan demikian, peningkatan keterampilan dalam mengolah eceng gondok menjadi produk bernilai tambah masih menjadi tantangan yang memerlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas berkelanjutan.

Dalam konteks keterlibatan masyarakat, berbagai penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada keterlibatan warga dan dukungan kelembagaan. Patony (2019) menunjukkan bahwa tahapan pemberdayaan yang tidak berjalan optimal menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Setiyaningsih & Yuliani (2022) serta Anggara & Rezki (2023) juga menemukan bahwa keterbatasan akses modal, pasar, dan dukungan lembaga membuat masyarakat belum dapat terlibat aktif. Oleh karena itu, diperlukan model pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga memperkuat partisipasi, akses pasar, dan dukungan kelembagaan secara berkelanjutan.

1.5.2 Administrasi Publik

Kata "administrasi publik" terdiri dari dua unsur, yaitu "administrasi" dan "publik." Istilah "administrasi" berasal dari bahasa Yunani, yang terbentuk dari dua bagian: *ad*, yang berarti secara intensif, dan *ministrare*, yang berarti memberikan layanan. Dengan demikian, administrasi dapat dipahami sebagai tindakan memberikan bantuan atau pelayanan dengan intensitas yang tinggi. Sementara itu, "publik" mengacu pada hal-hal yang bersifat umum, berkaitan dengan negara, masyarakat, atau orang banyak.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014), administrasi publik adalah proses pengelolaan sumber daya publik secara terorganisir untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Nicholas Henry (2014) menambahkan bahwa administrasi publik merupakan perpaduan antara teori dan praktik pemerintahan yang berfungsi menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah agar kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan administrasi publik dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Basheka (2012), Henry (2007), *International Encyclopedia of the Social Sciences* (1968), dan Peters (2003). Nicholas Henry telah beberapa kali memperbarui artikel tinjauannya yang diterbitkan pada tahun 1975. Dalam artikel

tersebut, ia awalnya mengidentifikasi empat paradigma, yang kemudian berkembang menjadi enam paradigma dalam publikasi selanjutnya (Henry, 2007) yaitu:

Paradigma 1: Dikotomi Politik-Administrasi (1900–1926)

Paradigma ini menekankan pemisahan antara fungsi politik dan administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Diperkenalkan oleh Woodrow Wilson (1897), paradigma ini menegaskan bahwa administrasi harus dijalankan secara ilmiah dan profesional seperti di sektor swasta. Wilson mengusulkan empat prinsip utama: pemisahan politik dan administrasi, analisis perbandingan dengan sektor swasta, penerapan praktik bisnis untuk efisiensi, serta peningkatan kinerja melalui pelatihan dan sistem penilaian pegawai. Paradigma ini menjadi dasar ilmiah bagi studi administrasi publik, dengan membedakan ranah nilai (politik) dan fakta (administrasi) sebagaimana ditegaskan oleh Henry (1975).

Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)

Paradigma prinsip-prinsip administrasi (1927–1937) menekankan adanya prinsip ilmiah universal dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Puncaknya adalah konsep POSDCORB oleh Gulick dan Urwick (1937), yang menegaskan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam birokrasi. Bersama paradigma dikotomi politik-administrasi, keduanya membentuk model tradisional administrasi publik yang menekankan

birokrasi hierarkis, netral, dan profesional. Namun, paradigma ini kemudian dikritik karena dianggap terlalu kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan.

Paradigma 3: Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970)

Paradigma ketiga menandai pergeseran pandangan bahwa administrasi publik merupakan bagian dari ilmu politik, bukan bidang yang terpisah. Konsep dikotomi politik-administrasi mulai dipertanyakan karena keduanya saling berkaitan dalam praktik pemerintahan. Basheka (2012) menyebut masa ini sebagai era “membongkar dikotomi dan prinsip,” sementara Simon (1947) mengkritik prinsip-prinsip administrasi tradisional sebagai tidak ilmiah. Administrasi publik kemudian dipandang sejajar dengan ilmu politik dan berfokus pada penguatan institusi, birokratisasi, serta pembangunan kapasitas organisasi menuju negara kesejahteraan (Farazmand, 2002).

Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956–1970)

Menurut Henry (1975), paradigma keempat (1956–1970) memandang administrasi publik sebagai manajemen, menunjukkan persaingan antara ilmu politik dan manajemen dalam menentukan arah disiplin ini. Meskipun kedua bidang tersebut mendominasi, administrasi publik tetap bertahan dan berkembang sebagai disiplin tersendiri. Perkembangan berikutnya, yakni paradigma *Public Administration as*

Public Administration atau *Public Management* (1970–1990), menandai pergeseran menuju manajemen publik yang lebih praktis dan terfokus.

Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970–Sekarang) dan NPM

Paradigma kelima menandai upaya menjadikan administrasi publik sebagai disiplin mandiri dengan pergeseran dari birokrasi tradisional ke model New Public Management (NPM) yang berorientasi pada efisiensi, pasar, dan praktik sektor swasta. NPM menantang asumsi birokrasi Weberian dan menekankan manajemen generik serta peran negara yang lebih terbatas. Pergeseran ini kemudian mengarah pada paradigma Governance, yang menekankan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Menurut Peters (2003), perubahan paradigma ini lebih dipicu oleh praktik daripada ide, dan kini paradigma governance dianggap sebagai orientasi utama dalam teori dan praktik administrasi publik modern.

Paradigma 6: Governance (1990–Sekarang)

Paradigma governance berkembang pada akhir 1980-an hingga 1990-an sebagai respons terhadap kelemahan New Public Management (NPM) yang terlalu berfokus pada efisiensi. Governance menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyediaan layanan publik melalui jaringan dan partisipasi. Jika NPM bertujuan mengurangi biaya dan peran negara, governance menekankan partisipasi, keadilan, dan desentralisasi kekuasaan. Paradigma ini muncul

dari akar neoliberalisme namun berevolusi menjadi pendekatan yang menyoroti kemitraan lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas pemerintahan (Peters, 2003; Wu & He, 2009).

Penelitian “Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bengok Craft di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang” relevan dengan Paradigma 6: Tata Kelola (Governance) karena menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pemberdayaan berbasis sumber daya lokal. Paradigma ini menyoroti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sejalan dengan peran berbagai pihak dalam pengelolaan Bengok Craft. Selain faktor internal masyarakat, pemberdayaan juga dipengaruhi kebijakan, dukungan finansial, dan jejaring kerja sama. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bottom-up, di mana pembangunan berangkat dari potensi dan kebutuhan lokal.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen merupakan elemen penting yang diperlukan oleh setiap organisasi. Tanpa adanya manajemen yang efektif, berbagai upaya yang dilakukan akan menjadi kurang terarah, sehingga tujuan organisasi akan lebih sulit untuk dicapai. Menurut Stoner, manajemen didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengaturan, pengarahan, dan pemantauan terhadap aktivitas anggota dalam suatu organisasi. Selain itu, manajemen juga mencakup pengelolaan sumber

daya organisasi lainnya dengan tujuan memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Luther Gulick, seperti dikutip dalam Handoko (2014:11), menjelaskan bahwa manajemen adalah disiplin ilmu yang mempelajari alasan dan cara manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen berfokus pada pengembangan sistem kerja sama yang efisien dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Gulick, manajemen layak disebut ilmu pengetahuan karena telah dikaji dan dirumuskan dalam teori yang terstruktur, sehingga berfungsi bukan hanya sebagai praktik, tetapi juga sebagai kerangka ilmiah untuk menciptakan efisiensi dan keharmonisan dalam organisasi.

Donovan dan Jackson (2013:11-12) mendefinisikan manajemen publik sebagai serangkaian aktivitas yang dijalankan menggunakan berbagai keterampilan khusus. Dapat disimpulkan bahwa manajemen publik melibatkan penerapan kemampuan tertentu yang diperlukan untuk mengelola sumber daya dan menjalankan tugas-tugas dalam sektor publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kompetensi teknis dan keahlian praktis dalam memastikan bahwa layanan publik dikelola secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Melalui pemanfaatan keterampilan ini, manajemen publik berupaya mencapai tujuan organisasi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Manajemen publik berperan penting dalam penelitian “Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bengok Craft di Desa Kesongo”

karena memastikan program pemberdayaan berjalan efisien, efektif, dan berkelanjutan. Melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, manajemen publik membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, manajemen publik juga berperan dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan agar berjalan optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kesongo.

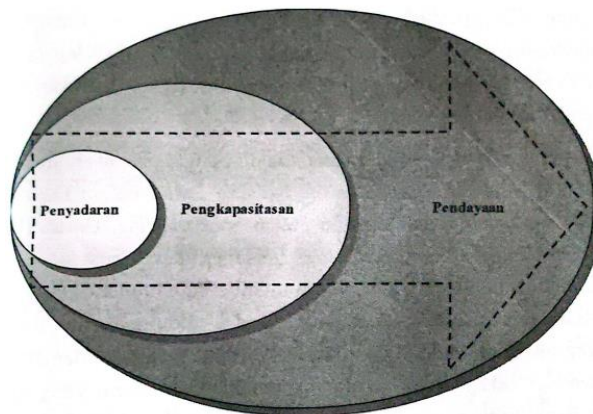
1.5.5 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses menuju kondisi berdaya, yaitu proses memperoleh kekuatan atau pemberian daya dari pihak yang memiliki kemampuan kepada pihak yang masih kurang berdaya (Sulistiyani, 2004, dalam Sulistiyani & Wulandari, 2017). Istilah proses mengacu pada serangkaian langkah yang berlangsung secara sistematis dan berurutan sebagai upaya mengubah masyarakat dari kondisi belum berdaya menuju keadaan yang lebih mandiri. Sementara itu, makna memperoleh daya menunjukkan bahwa inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu melalui kesadaran akan ketidakberdayaan mereka dan upaya nyata untuk memperbaiki keadaan menuju keberdayaan (Sulistiyani & Wulandari, 2017).

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996) dalam La Patilaiya (2022), proses pemberdayaan memiliki dua kecenderungan utama. Pertama, pemberdayaan dipahami sebagai proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada

masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kedua, pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai proses yang mendorong, menstimulasi, dan memotivasi individu untuk mengembangkan kemampuan menentukan pilihan hidupnya sendiri melalui dialog dan kesadaran diri.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan bukanlah kegiatan yang terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian proses yang terencana dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, proses pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007), proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu:



Gambar 1.6 Tiga Tahapan Pemberdayaan

Sumber: Diambil dari Wrihatnolo, R., & Dwidjowijoto, R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

1. Tahap Penyadaran

Tahap pertama adalah penyadaran, yaitu proses memberikan *pencerahan* kepada masyarakat agar menyadari bahwa mereka memiliki hak dan potensi untuk memperbaiki kehidupannya.

Misalnya, pada kelompok masyarakat miskin, mereka diberikan pemahaman bahwa kemiskinan dapat diatasi bila mereka memiliki kapasitas dan kemauan untuk keluar dari kondisi tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini dapat berupa penyuluhan atau pendidikan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing*, untuk menumbuhkan keyakinan diri bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri mereka sendiri (*self-demand for empowerment*), bukan semata-mata datang dari pihak luar.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap kedua adalah pengkapasitasan atau *capacity building*, yang berarti memberikan daya, kemampuan, dan keterampilan agar masyarakat siap menerima tanggung jawab dan kekuasaan. Pengkapasitasan dilakukan pada tiga jenis:

- a. Pengkapasitasan manusia, yaitu membekali individu atau kelompok dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman melalui pelatihan, *workshop*, seminar, atau simulasi. Tujuannya agar masyarakat menjadi cakap (*skilful*) dan mampu mengelola tanggung jawab yang akan diberikan.
- b. Pengkapasitasan organisasi, yakni memperkuat atau membentuk wadah kelembagaan yang efisien sebelum diberikan peluang usaha atau kewenangan.
- c. Pengkapasitasan sistem nilai, yaitu pembentukan aturan main dan tata kelola (*rule of the game*) agar masyarakat memiliki pedoman

bersama dalam menjalankan kegiatan. Sistem nilai ini dapat berupa AD/ART, prosedur, budaya organisasi, etika, dan prinsip *good governance*.

3. Tahap Pendayaan

Tahap ketiga adalah pendayaan, yaitu proses pemberian kekuasaan, otoritas, atau peluang kepada masyarakat untuk mengelola dirinya sendiri. Pemberian kewenangan ini harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan (kecakapan) yang sudah dibangun pada tahap sebelumnya. Tahap ini sangat penting karena sering kali kekuasaan atau tanggung jawab diberikan bukan berdasarkan kemampuan, melainkan sekadar pemenuhan syarat administratif. Akibatnya, penerima daya sering kali tidak siap secara kapasitas, sehingga muncul masalah dalam pelaksanaan kewenangan dan keberlanjutan program. Prinsip utamanya adalah pemberian daya harus proporsional dengan kemampuan penerimanya.

1.5.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor pendorong proses pemberdayaan masyarakat merupakan berbagai elemen atau kondisi yang berperan dalam memacu, mempercepat, dan mendukung terjadinya proses pemberdayaan di dalam suatu kelompok atau komunitas. Pemberdayaan sendiri dipahami sebagai proses ketika individu atau kelompok memperoleh kekuatan, kemampuan, serta kesempatan untuk mengelola kehidupannya secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang

memengaruhi mereka. Sebaliknya, faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat adalah elemen atau kondisi yang dapat menghalangi, memperlambat, atau menurunkan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi hambatan dalam upaya individu maupun kelompok untuk mengembangkan kekuatan, keterampilan, dan peluang yang diperlukan guna mencapai kemandirian serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka (Sulistyaningrum, Sugihardjo, & Ihsaniyati, 2024).

Menurut Mardikanto (2013), faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat merupakan unsur yang berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Meskipun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menambahkan unsur proses, namun konsep tersebut tetap relevan dalam konteks penelitian ini. Hal ini karena pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan sistematis, sebagaimana dijelaskan oleh Sulistiyani dan Wulandari (2017) bahwa pemberdayaan mencerminkan rangkaian upaya terencana untuk mengubah masyarakat dari kondisi belum berdaya menuju keadaan yang lebih mandiri. Dengan demikian, setiap faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat, baik yang bersifat pendorong maupun penghambat, juga memiliki peran penting dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan proses pemberdayaan itu sendiri. Sejalan dengan pendapat La Patilaiya (2022), pemberdayaan bukan hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga pada dinamika tahapan yang

melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga faktor-faktor yang berperan dalam pemberdayaan pada hakikatnya turut memengaruhi keberlangsungan prosesnya.

Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013) antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam menjadi faktor penting karena memiliki hubungan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dapat menciptakan peluang ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, air bersih, dan energi. Akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya alam juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaannya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM memiliki peran sentral dalam pemberdayaan karena kreativitas, kemampuan belajar, serta adaptasi masyarakat menentukan keberhasilan program. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial menjadi kunci untuk memperkuat keterlibatan individu. Selain itu, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar juga menjadi indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Keadaan Kelembagaan

Lembaga, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah, berfungsi dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, serta menyediakan berbagai bentuk dukungan seperti pendidikan, pendanaan, dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, keberadaan lembaga pelatihan turut membantu peningkatan keterampilan individu, sedangkan lembaga yang bersifat demokratis berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan sistem kelembagaan yang kuat dan kolaboratif sehingga mampu memperkuat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses transportasi, teknologi informasi, fasilitas pelatihan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi, dapat meningkatkan mobilitas serta mempermudah masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Lingkungan dengan sarana dan prasarana yang baik juga berkontribusi pada terciptanya kondisi sosial dan ekonomi yang lebih produktif, sehingga mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

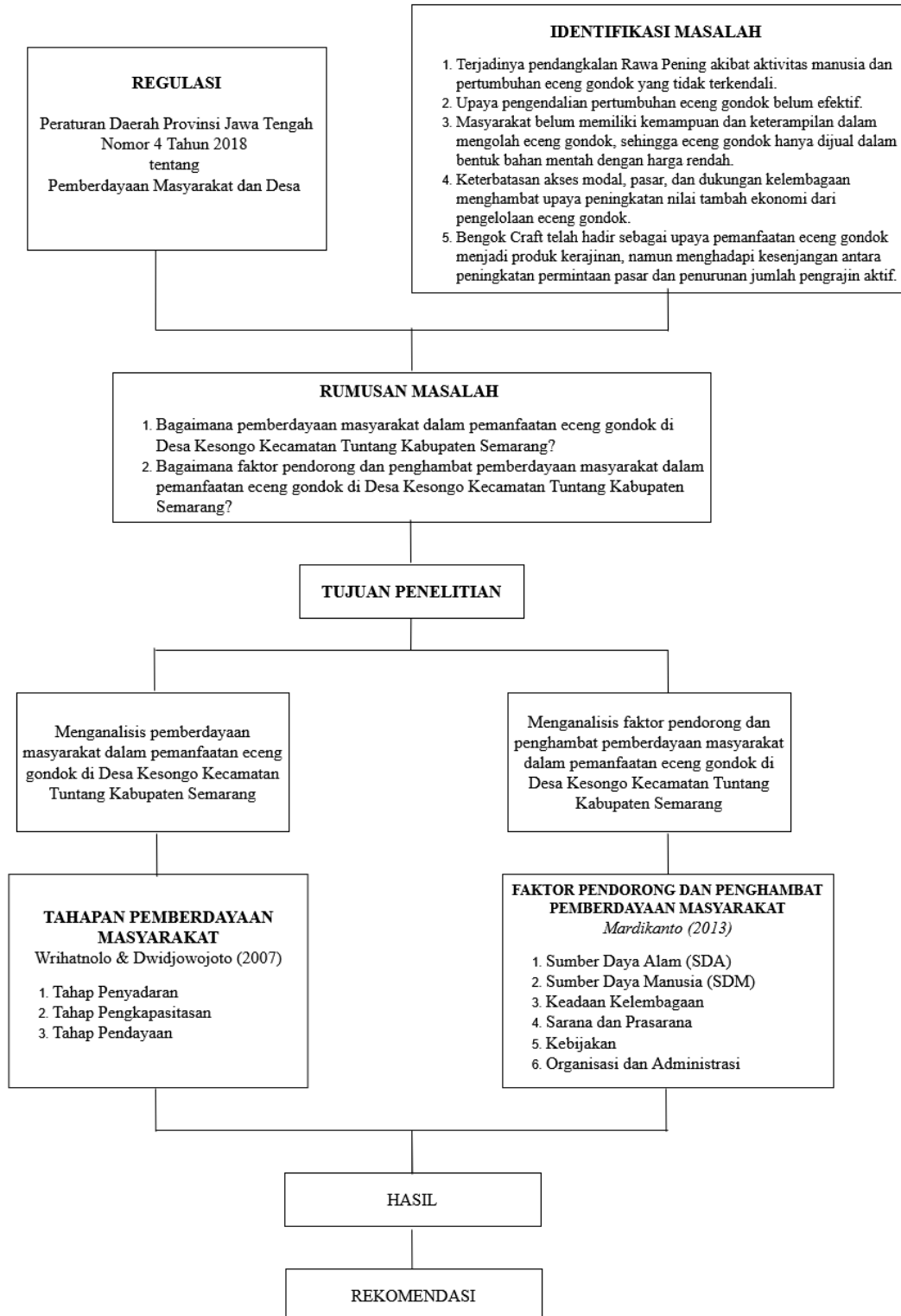
5. Kebijakan

Kebijakan yang berpihak pada masyarakat memiliki peranan penting sebagai landasan dan arah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam berbagai bidang pembangunan. Kebijakan yang inklusif juga berkontribusi pada terciptanya kesetaraan sosial serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

6. Organisasi dan Administrasi

Faktor ini mencakup pengelolaan struktur, tujuan, serta distribusi sumber daya secara efektif. Organisasi yang baik akan mengarahkan energi dan potensi masyarakat menuju tujuan pemberdayaan. Komunikasi yang efektif, budaya organisasi yang positif, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan dan keadilan sosial. Selain itu, koordinasi yang terencana dan sistem administrasi yang transparan juga diperlukan agar setiap kegiatan pemberdayaan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

1.5.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1.7 Kerangka Berpikir

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong masyarakat agar mampu mengenali potensi yang dimiliki, meningkatkan kemampuan, dan memanfaatkannya secara mandiri. Dalam proses ini, masyarakat berperan aktif sebagai pelaku utama yang terlibat mulai dari tahap penyadaran, pengkapasitasan, hingga pendayaan, sehingga tercipta kemandirian serta perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai kondisi lokal.

1.6.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat adalah berbagai unsur, baik yang berasal dari dalam masyarakat (internal) maupun dari luar (eksternal), yang memengaruhi keberhasilan upaya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor tersebut memengaruhi tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan melalui pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, kebijakan, serta organisasi dan administrasi yang digunakan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1.	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	Tahap Penyadaran Proses memberikan pencerahan kepada masyarakat agar menyadari hak dan potensi yang dimiliki untuk memperbaiki kehidupannya. Melalui kegiatan seperti penyuluhan atau pendidikan yang bersifat <i>kognisi</i> , <i>belief</i> , dan <i>healing</i> , masyarakat ditumbuhkan keyakinannya bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri sendiri (<i>self-demand for empowerment</i>).	1. Pemahaman hak dan potensi 2. Pemberian pengetahuan yang bersifat <i>kognisi</i> , <i>belief</i> , dan <i>healing</i> 3. Perubahan dan kemauan diri masyarakat untuk diberdayakan
		Tahap Pengkapasitasan Proses memberikan kemampuan dan keterampilan agar masyarakat siap menerima tanggung jawab dan kewenangan. Tahap ini mencakup pengkapasitasan manusia melalui pelatihan dan pengalaman, pengkapasitasan organisasi dengan memperkuat kelembagaan, serta pengkapasitasan sistem nilai melalui pembentukan aturan dan tata kelola bersama.	1. Pengkapasitasan manusia 2. Pengkapasitasan organisasi 3. Pengkapasitasan sistem nilai
		Tahap Pendayaan Proses pemberian kekuasaan, otoritas, atau peluang kepada masyarakat untuk mengelola dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional agar masyarakat siap secara kapasitas dan mampu menjaga keberlanjutan program.	1. Pemberian kekuasaan, otoritas, atau peluang 2. Pemberian Kewenangan Kepada Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Kegiatan 3. Kapasitas masyarakat mengelola daya yang diberikan
2.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat	Sumber Daya Alam (SDA) Berperan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemanfaatan yang bijak dapat menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, sementara akses masyarakat terhadap pengelolaannya mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan.	1. Pemanfaatan SDA secara bijak dan berkelanjutan 2. Peluang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 3. Akses masyarakat terhadap

			pengelolaan sumber daya
		Sumber Daya Manusia (SDM) Berperan dalam pemberdayaan karena kreativitas, kemampuan belajar, dan adaptasi masyarakat menentukan keberhasilan program. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan serta peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan menjadi kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat.	1. Tingkat kreativitas, kemampuan belajar, dan adaptasi masyarakat 2. Partisipasi aktif masyarakat
		Kelembagaan Berperan dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan memfasilitasi pendidikan, pendanaan, serta infrastruktur. Melalui lembaga pelatihan dan lembaga demokratis, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, sementara kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat memperkuat sinergi pemberdayaan.	1. Peran dalam merumuskan kebijakan 2. Peran dalam mengelola sumber daya 3. Peran dalam fasilitas pendidikan, pendanaan, serta infrastruktur 4. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
		Sarana dan Prasarana Segala bentuk fasilitas fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan fasilitas publik menjadi bagian penting yang memengaruhi aksesibilitas, mobilitas, serta peluang masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.	1. Ketersediaan fasilitas fisik maupun nonfisik menunjang kegiatan produksi dan pelatihan 2. Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan fasilitas publik
		Kebijakan Seperangkat aturan, program, dan keputusan pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan. Kebijakan yang konsisten dan berpihak pada masyarakat dapat membuka akses atau peluang, melindungi hak, mendorong kesetaraan, dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.	1. Dukungan aturan, program, dan keputusan pemerintah terhadap pemberdayaan 2. Konsistensi kebijakan dalam mendukung sektor kerajinan lokal
		Organisasi dan Administrasi Mencakup pengelolaan struktur, tujuan, serta distribusi sumber daya secara efektif. Melalui komunikasi yang baik, budaya organisasi yang	1. Pengelolaan struktur, tujuan dan distribusi sumber daya

		positif, dan pengembangan sumber daya manusia, organisasi dapat mengarahkan potensi masyarakat menuju tujuan pemberdayaan dan terciptanya keadilan sosial.	2. Efektivitas komunikasi dan koordinasi antar anggota/pengelola 3. Budaya organisasi yang positif 4. Pengarahan organisasi menuju tujuan pemberdayaan
--	--	--	--

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan mampu menjaga lingkungan. Chambers (1994) dalam Maslihah et al. (2022) menekankan bahwa pemberdayaan harus memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengembangkan kemampuan, dan membangun rasa percaya diri. Di Desa Kesongo, pemanfaatan eceng gondok melalui Bengok Craft mencerminkan upaya untuk menumbuhkan kreativitas, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan perubahan positif bagi warga yang sebelumnya belum memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan keterampilan maupun memulai usaha secara lebih produktif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam memperbaiki proses pemberdayaan yang selama ini berjalan. Melalui penelitian ini, rekomendasi yang lebih tepat dapat disusun agar kapasitas masyarakat meningkat, keterlibatan lebih luas, dan dukungan kelembagaan menjadi lebih kuat. Hal-hal seperti pendampingan, akses permodalan, dan

pemasaran perlu diperhatikan untuk membantu pengembangan usaha berbasis potensi lokal, khususnya pengolahan eceng gondok di Desa Kesongo (Patony, 2019; Setiyaningsih & Yuliani, 2022; Anggara & Rezki, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun eceng gondok memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai, masyarakat Desa Kesongo belum sepenuhnya mampu memanfaatkannya. Keterbatasan dalam keterampilan, modal, akses pasar, kurangnya dukungan pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan ini masih terbatas, yang tercermin dari jumlah pengrajin yang cenderung menurun membuat proses pemberdayaan belum memberikan hasil yang optimal. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami bagaimana tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) dijalankan dalam Bengok Craft serta apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilannya, baik yang mendukung maupun yang menghambat.

1.9 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:2), metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian memiliki keterkaitan yang erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang diterapkan. Desain penelitian harus disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, sedangkan prosedur, teknik, dan alat yang dipakai juga harus selaras dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

Menurut Sudaryono (2023), Metode penelitian terdiri atas tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya “menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dalam latar alamiah,” di mana peneliti harus mampu melebur dengan subjek serta menyajikan pemahaman secara mendalam. Penelitian kuantitatif, sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian ini “bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara numerik melalui variabel yang dapat diukur dan dianalisis statistik,” sehingga hubungan antarvariabel dapat dipahami secara objektif (Nanang Martono dalam Sudaryono, 2023). Adapun metode kombinasi menurut Sugiyono (2011:404 dalam Sudaryono, 2023) adalah pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan suatu pendekatan untuk meneliti objek, peristiwa, atau kondisi dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat (Nazir, 2014). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, pemahaman, serta perspektif masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan, termasuk faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemberdayaan mereka.

1.9.1 Tipe Penelitian

Menurut Nazir (2003), tipe penelitian merupakan pola atau bentuk penelitian yang dipilih peneliti untuk mempelajari suatu masalah secara sistematis sesuai tujuan penelitian. Purba dan Simanjuntak (2012) mengelompokkan tipe penelitian menjadi tiga, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori. Penelitian eksploratif digunakan ketika permasalahan belum dirumuskan secara jelas, sehingga pelaksanaannya fleksibel dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan temuan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara objektif dengan masalah yang telah jelas, dan dapat dilakukan melalui survei, studi kasus, atau studi perbandingan. Adapun penelitian eksplanatori digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel melalui perumusan dan pengujian hipotesis secara empiris.

Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pemilihan tipe ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memberikan gambaran mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo secara objektif dan sistematis. Penelitian deskriptif dianggap paling sesuai karena mampu menjelaskan fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, serta keterlibatan para informan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan bagaimana pemberdayaan dijalankan, peran berbagai pihak dalam kegiatan khususnya pemerintah desa, serta faktor

pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

1.9.2 Situs dan Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:399), situs penelitian merupakan bagian dari lokasi tempat peneliti mengumpulkan data, mengamati keadaan lapangan, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian. Sementara itu, lokasi penelitian adalah tempat di mana situasi sosial diteliti untuk memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Desa Kesongo merupakan salah satu desa yang terletak di kawasan sekitar Danau Rawa Pening. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, khususnya eceng gondok (*Eichhornia crassipes*), yang tumbuh subur dan tidak terkendali di perairan Rawa Pening. Pemilihan Desa Kesongo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini merupakan pusat berdirinya Bengok Craft, sebuah usaha mikro kreatif yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan berbahan dasar eceng gondok.

Situs penelitian dilakukan di Bengok Craft, sebuah unit usaha mikro kreatif yang berlokasi di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Bengok Craft dipilih sebagai situs penelitian karena menjadi pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis

potensi lokal, di mana warga Desa Kesongo dilibatkan secara langsung dalam proses pengolahan eceng gondok menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi. Di tempat ini berlangsung berbagai aktivitas pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, proses produksi, hingga pemasaran produk. Melalui penelitian di situs Bengok Craft, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana masyarakat berinteraksi, memperoleh akses terhadap sumber daya, serta bertransformasi dari sekadar pengambil bahan mentah menjadi pelaku ekonomi kreatif yang mandiri.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), subjek penelitian adalah individu atau pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti dan berperan sebagai informan untuk memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian dipilih karena mampu memberikan keterangan yang dapat menggambarkan karakteristik dari fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek lebih sering menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2022). *Purposive sampling* digunakan karena peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti sehingga dapat memberikan data yang relevan. Sementara itu, teknik *snowball sampling* dilakukan dengan cara menentukan informan awal,

kemudian informan tersebut merekomendasikan informan berikutnya yang juga memiliki pengetahuan terkait topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti menentukan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu individu yang dianggap paling memahami, terlibat langsung, dan memiliki pengalaman mendalam terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui Bengok Craft di Desa Kesongo.

Namun, apabila informasi yang diperoleh dari informan awal dirasa masih belum lengkap atau belum menggambarkan keseluruhan konteks penelitian, maka peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai langkah lanjutan. Melalui teknik ini, informan awal dapat merekomendasikan informan lain yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan terkait fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memudahkan peneliti untuk memperluas jaringan informan secara alami dan memperoleh data tambahan. Dengan kombinasi kedua teknik ini, peneliti dapat menggali data secara mendalam sekaligus memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan yang dipilih untuk dilakukan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang meliputi:

1. Pendiri Bengok Craft : Informan utama yang memahami latar belakang, tujuan, serta proses pemberdayaan masyarakat melalui usaha kerajinan berbahan eceng gondok.
2. Pengelola Bengok Craft : Memberikan informasi mengenai strategi pelaksanaan, kendala, dan capaian program pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala Desa Kesongo : Menyampaikan pandangan terkait peran dan dukungan pemerintah desa terhadap keberlangsungan kegiatan Bengok Craft.
4. Sekretaris Desa Kesongo : Memberikan data mengenai koordinasi, pelaksanaan, serta bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah desa dalam mendukung kegiatan Bengok Craft.
5. Pengrajin Bengok Craft : Menyampaikan pengalaman langsung mengenai proses pemberdayaan, peran mereka dalam kegiatan produksi, manfaat yang diperoleh, serta dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan dari keterlibatan dalam Bengok Craft.
6. Masyarakat yang Belum terlibat dalam Bengok Craft : Memberikan pandangan luar tentang persepsi masyarakat terhadap program Bengok Craft serta alasan belum berpartisipasi.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang mengacu pada informasi yang tidak diukur secara langsung (Hadi, 2015: 91). Menurut Muhadjir (1998:29), data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi atau

kata-kata, bukan angka. Dengan kata lain, data kualitatif mencakup informasi yang disampaikan melalui deskripsi verbal, bukan pengukuran numerik. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum Desa Kesongo, penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

1.9.5 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2012:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data lainnya seperti dokumen, foto, maupun statistik berfungsi sebagai data pendukung. Menurut Sugiyono (2022), terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2022), data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, atau interaksi langsung di lapangan dengan pihak-pihak yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik Bengok Craft, para pengrajin, masyarakat sekitar, serta perangkat Desa Kesongo yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2022), data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui berbagai dokumen, arsip, atau literatur yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, artikel ilmiah, jurnal penelitian, buku referensi, laporan profil Desa Kesongo, situs web resmi Bengok Craft, serta berita online yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan eceng gondok di sekitar Rawa Pening.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2014), pengumpulan data adalah "proses yang dilaksanakan secara terstruktur dan terstandarisasi untuk mendapatkan data yang diperlukan." Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data mencakup observasi (pengamatan langsung), wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2020:109), observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh atau holistik terhadap fenomena yang diteliti.

Peneliti turun langsung ke lapangan di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, untuk melakukan

observasi. Selama proses ini, peneliti mengamati kehidupan dan kegiatan dari individu yang menjadi fokus penelitian. Peneliti melakukan observasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan observasi terbuka, di mana peneliti secara jelas memberitahukan kepada informan bahwa ia sedang melaksanakan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2020:114), wawancara adalah proses pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan gagasan melalui kegiatan tanya jawab, sehingga dapat diperoleh pemahaman atau makna terkait suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap paling relevan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Peneliti secara selektif menentukan informan berdasarkan kemampuan mereka memberikan informasi yang mendalam terkait topik penelitian.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini dipilih karena peneliti memiliki panduan wawancara yang mencakup daftar pertanyaan utama yang dapat dikembangkan dan disesuaikan selama wawancara di lapangan.

Selama wawancara, peneliti memanfaatkan alat perekam suara berupa handphone untuk merekam dan menyimpan percakapan dengan subjek penelitian. Penggunaan alat perekam dinilai efektif karena mampu menangkap data secara akurat dan memudahkan peneliti dalam mendokumentasikan hasil wawancara.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik Bengok Craft, para pengrajin yang aktif, masyarakat Desa Kesongo yang belum terlibat, perangkat desa, serta pihak lembaga yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pemberdayaan. Semua wawancara tersebut dilaksanakan dengan persetujuan dari masing-masing informan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari berbagai catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan,

gambar atau foto, maupun hasil karya seseorang atau lembaga yang memiliki nilai penting.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, arsip, dan laporan penelitian. Dokumen yang digunakan mencakup informasi terkait Desa Kesongo, termasuk arsip penting seperti data jumlah penduduk, kondisi perekonomian masyarakat, serta gambaran geografis dan wilayah Desa Kesongo. Buku yang dipakai mencakup topik-topik terkait proses pemberdayaan. Penelitian ini juga merujuk pada artikel jurnal dan skripsi yang relevan dengan proses pemberdayaan, yang diperoleh baik dari pustaka tertulis maupun sumber daring. Dokumentasi visual berupa foto juga disertakan, yang diambil selama observasi dan wawancara menggunakan ponsel, serta foto-foto dokumen yang diberikan oleh informan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah semua data terkumpul dalam penelitian ini, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut melalui proses analisis, menjelaskan isi data secara rinci, dan menarik kesimpulan. Karena jenis data yang dikumpulkan berupa keterangan atau penjelasan dari informan, maka digunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dilakukan setelah semua data selesai dikumpulkan, tetapi sudah dimulai sejak proses pengumpulan data

berlangsung. Seperti yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31–33), analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan utama yang dilakukan secara bersamaan, yaitu: meringkas dan memilih data penting (*data condensation*), menyajikan data secara terstruktur (*data display*), dan menarik serta memverifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses menyaring dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan, seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data lainnya. Di tahap ini, peneliti memilih data yang penting dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak dibutuhkan disisihkan, sehingga hanya informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dianalisis. Proses ini membantu peneliti untuk lebih fokus pada inti permasalahan yang sedang dikaji.

Pada tahap kondensasi data, peneliti mulai menyaring dan merangkum data dari hasil wawancara dengan informan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, pendiri Bengok Craft, pengrajin, dan masyarakat setempat. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, seperti pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan eceng gondok, disisihkan. Hanya informasi yang berkaitan dengan proses pemberdayaan, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Hal ini dilakukan agar data

yang dikaji benar-benar sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah cara untuk menata dan menyusun informasi yang sudah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami. Tujuannya adalah agar peneliti bisa melihat pola, hubungan, atau temuan penting dari data yang ada. Data hasil wawancara yang telah diringkas kemudian disusun dalam bentuk yang sistematis, seperti tabel, narasi, atau matriks, agar memudahkan proses penarikan kesimpulan.

Pada tahap penyajian data, informasi yang telah diseleksi kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Misalnya, data mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo (penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan) serta faktor penghambat dan pendukung proses pemberdayaan ditata dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data ini membantu peneliti untuk melihat pola keterlibatan masyarakat, bentuk dukungan yang diterima, serta kendala yang dihadapi selama proses pemberdayaan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap ini merupakan proses menyimpulkan makna dari data yang telah dianalisis. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai

mencari pola, hubungan sebab-akibat, atau hal-hal yang berulang. Kesimpulan akhir biasanya disusun setelah semua data terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh. Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan penelitian dan harus didasarkan pada bukti data yang kuat serta melalui proses pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.

Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti mulai menafsirkan makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diambil didasarkan pada temuan di lapangan yang menjelaskan mengapa keberadaan Bengkok Craft belum mampu memberdayakan penduduk yang belum bekerja, dengan menelaah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berlangsung serta sejauh mana tahap-tahapnya diterapkan. Selain itu, peneliti juga menilai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan tersebut. Proses ini juga dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data dan menjawab rumusan masalah penelitian.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, keandalan hasil sangat bergantung pada keabsahan data, yaitu sejauh mana data dapat dipercaya dan mencerminkan realitas di lapangan (Afiyanti & Rachmawati, 2014). Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018), validitas data bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai waktu dan situasi sosial,

sehingga perlu diuji secara terus-menerus melalui perbandingan dan konfirmasi berulang.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pengecekan data melalui berbagai sudut pandang seperti sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

1. Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan berbeda untuk memastikan konsistensi data.
2. Triangulasi Teknik dilakukan dengan memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang sama agar data saling menguatkan.
3. Triangulasi Waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data di waktu berbeda guna menghindari pengaruh kondisi emosional narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber karena pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang melibatkan berbagai pihak dengan pandangan yang berbeda. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendiri Bengok Craft, Pengrajin Bengok Craft, serta masyarakat belum terlibat dalam kegiatan kerajinan. Melalui perbandingan data dari berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh mengenai proses pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Desa Kesongo.